



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 50
TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan rekomendasi Tim Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB yang dituangkan dalam Risalah Hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, perlu diatur Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 50), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 50
 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI : "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun					Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022
Misi 1 : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.											
Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)											
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi											
		N/A	N/A	50	52	54	56	58			
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah I Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah II Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah III	PENGAWASAN	INSPEKTORAT

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun					Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	
										Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah IV	PENGAWASAN	INSPEKTORAT
										Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH
										Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi		
										Program perencanaan pembangunan daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	
										Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup		
										Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		
										Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan		
3	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah I	PENGAWASAN	INSPEKTORAT
										Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah II		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
										Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah III	PENGAWASAN	INSPEKTORAT
										Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Wilayah IV		
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	N/A	85	87	90	95	96	99	Program Penataan Administrasi Kependudukan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
										Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
										Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD
										Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
										Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Kecamatan
										Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	KESEHATAN	RSUD
										Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
										Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan	KESEHATAN	Dinas Kesehatan (Labkesda dan Puskesmas)

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.												
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia												
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia		71,13	71,58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,83				
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,42	12,61	12,8	13	13,19	13,38	13,57	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidikan Non Formal									
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,05	8,24	8,43	8,63	8,82	9,01	9,2	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
			Program Pendidikan Sekolah Dasar									
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan										
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,21	70,4	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Program Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat									
			Program Peningkatan Mutu dan Akses Layanan									
			Program Sumber Daya Kesehatan									
3.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Cabang olahraga yang berprestasi	NA	1	29	31	33	35	46	Program Pembinaan dan pasyarakatatan olahraga	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun					Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022
Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup											
Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan											
Indikator Tujuan 1 : Pertumbuhan Ekonomi		NA	NA	7,48	7,53	7,58	7,63	7,68			
1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Pesentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5,50	5,80	5,90	6,50	7,10	7,50	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
									Program Pengembangan Sentra dan Kluster Industri		
	Pesentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		7,40	7,50	7,70	8,00	8,30	8,50	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	PERDAGANGAN	
									Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		
	Pesentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan		N/A	10	12	13	15	15	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PERTANIAN	
									Program Peningkatan Produksi Hortikultura		
									Program Peningkatan Produksi Perkebunan		
									Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian		
									Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	PETERNAKAN	
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				
							Program Pengembangan Agribisnis Peternakan				
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan			

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
										Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan Program Pengembangan Perikanan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
2.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	N/A	N/A	2,16%	2,17%	2,18%	2,19%	2,20%	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	N/A	14,21	11,81	11,86	11,91	11,96	12	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat Program Intensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan Penerimaan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
3.	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan	Kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik		31,83	37,67	39,42	41,87	43,30	44,73	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	N/A	N/A	N/A	N/A	0,479%	0,476%	0,471%	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator Tujuan 2 : Angka Kemiskinan		5,27	5,00	4,50	4,30	4,10	3,90	3,50				
4.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	60%	63%	65%	67%	70%	73%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
5.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,16	3,04	2,93	2,82	2,71	2,61	2,50	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		N/A	N/A	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00				
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	N/A	50	53	56	59	62	65	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	60	63	66	69	72	Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		Indeks Tutupan Hutan	N/A	56,83	59	61	63	65	67	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan		
7.	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	N/A	115	108	101	94	87	80	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun					Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	
Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.												
Tujuan : Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis												
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Masyarakat		N/A	N/A	0,61	0,62	0,64	0,68	0,71				
1.	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	N/A	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Politik
										Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya desa mandiri	Persentase Desa Mandiri	N/A	0%	5%	5%	6%	6%	12%	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
										Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat		
										Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna		
3.	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	Indeks Pembangunan Gender	N/A	92,69	94,01	95,33	96,65	97,98	99,3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
										Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		
										Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan		
		Kategori Kabupaten Layak Anak	N/A	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Program Pengembangan Kab Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
										Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak		
										Program Percepatan Perlindungan Anak		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun						Program	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Tujuan : Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan												
Indikator Tujuan : Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan		N/A	10	20	30	40	50	60				
1.	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	NA	10%	20%	30%	40%	50%	70%	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
										Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Penegakan Perda dan Perkada	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
		Persentase penurunan tindak kriminal	NA	5,0%	7,5%	10%	12,5%	15%	17,5%	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Politik
Misi 6 : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata												
Tujuan : Peningkatan Pariwisata Daerah												
Indikator Tujuan :		Tourism Intencity Index	N/A	N/A	N/A	160	172	186	201			
1.	Meningkatkan industri kepariwisataan	Rata-rata lama tinggal	NA	2 Hari	2 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Persentase Peningkatan Wisatawan	NA	NA	5	7	8,03	9,05	10,15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		
		Spending of money	NA	86 M	86 M	88 M	90 M	92 M	95 M	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		
2.	Meningkatnya Kelestarian Seni dan Budaya	Persentase cagar budaya yang lestari	NA	6%	24%	41%	59%	76%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M.,
NIP. 19690112 199903 2 005